

ANALISIS PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2008-2013

Vitri Iga Masari¹

vitriigamasari@yahoo.co.id

Transna Putra Urip S.²

transnaputra@yahoo.co.id

Robert M. WST. Marbun³

robert@ieuncen.ac.id

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan belanja daerah provinsi papua, serta kecenderungan antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Objek yang diteliti adalah data Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua tahun 2008-2013. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dan Metode analisis yang digunakan yaitu analisis diskriptif untuk mengetahui pertumbuhan belanja daerah, serta Uji Chow untuk melihat kecenderungan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belanja daerah mengalami penurunan dan peningkatan dari tahun ke tahun, alasan penurunan dan peningkatan dikaitkan dengan belanja yang diperlukan dan kurang diperlukan pada tahun tersebut. Hasil pengujian menggunakan uji chow menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kecenderungan antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung, sehingga dinyatakan bahwa kecenderungan antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung sama dengan nilai koefisien pertumbuhan belanja langsung 0,95 dan koefisien pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 0,63.

Kata kunci : Pertumbuhan Belanja Daerah, Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan yang baik sangat diperlukan oleh suatu negara dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana pelayanan publik, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dengan berlakunya undang-undang 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan diri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki agar ketergantungan pemerintah daerah akan dana dari pusat berkurang. Disamping itu juga adanya tuntutan terhadap penciptaan kondisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang rasional dan proporsional.

¹ Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih..

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuannya menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Di sisi lain dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17 mendefinisikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengandung unsur pendapatan dan belanja, pendapatan yang dimaksud adalah sumber-sumber penerimaan untuk membiayai daerah tersebut, sedangkan belanja adalah pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perkembangan APBD terutama dari sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan transparan.

Berdasarkan pelaksanaan otonomi daerah maka seluruh daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri untuk mengelola pendapatan serta belanja daerahnya masing-masing termasuk provinsi papua.

Total belanja daerah provinsi papua dari tahun 2008-2013 mengalami peningkatan dan penurunan. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan inflasi, perubahan kurs rupiah, dan harga minyak. Pertumbuhan belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak diperlukan untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bisa dihilangkan dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting.

Tabel 1.
Total Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun 2008-2013

Tahun	Belanja Daerah
2008	5,750,667,126,461.00
2009	5,294,198,937,980.00
2010	5,650,474,891,742.14
2011	6,290,375,712,882.75

Tahun	Belanja Daerah
2012	7,239,667,120,200.00
2013	8,171,352,348,477.00

Sumber : Data BPKAD Provinsi Papua

Dari data belanja daerah diatas masing-masing terjadi peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Pertumbuhan belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan perubahan yang cukup besar yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui belanja mana yang menjadi alasan kenaikan dan penurunan pada pertumbuhan belanja daerah provinsi papua.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah berdasarkan pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dikelompokkan kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dari data belanja daerah Provinsi Papua tersebut akan dianalisis untuk mengetahui pertumbuhan belanja daerah. Analisis Pertumbuhan Belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan pradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka mencegah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Berdasarkan konsep-konsep pemikiran yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam studi ini yaitu: (a) Bagaimana tingkat pertumbuhan belanja daerah provinsi papua, (b) Apakah terdapat perbedaan kecenderungan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung di Provinsi Papua. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah: (a) Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan belanja daerah provinsi papua, (b) Untuk mengetahui ada tidak perbedaan kecenderungan antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah Provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Studi

Secara garis besarnya pendekatan yang digunakan dalam studi ini yaitu pendekatan kuantitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang analisisnya lebih focus pada data-data numerical (angka) yang diolah menggunakan metode statistika, yaitu informasi berupa angka yang meliputi total jumlah belanja daerah maupun nilai dari klasifikasi belanja provinsi papua tahun 2008-2013. Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk menganalisis pertumbuhan belanja daerah serta mempelajari perbedaan kecenderungan antara pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung provinsi papua.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari berbagai laporan dari beberapa institusi yang relevan. Data sekunder dalam studi ini yaitu data time series tahun 2008-2013 yang diperoleh dari sumber data APBD (BPKAD) berupa data belanja daerah provinsi papua. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi, jenis-jenis dokumen yang digunakan pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua.

Analisa Data

Untuk mencapai tujuan penelitian sebagaimana ditetapkan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis data antara lain: Analisis Deskriptif dan Uji Chow.

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud membuat kesimpulan tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan laporan belanja daerah provinsi papua periode 2008-2013, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberi keterangan-keterangan yang dihadapi. Dimana dalam menganalisis pertumbuhan belanja daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1} \times 100\%$$

Dimana :

Thn t = Tahun Sekarang

Thn t-1 = Tahun Lalu

Sumber : Mahmudi (2011:162)

Uji Chow

Metode *uji chow* digunakan Untuk mengetahui terdapat perbedaan kecenderungan atau tidak antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung maka digunakan alat analisis uji chow. Dengan menggunakan uji chow maka akan terlihat bahwa terdapat perbedaan kecenderungan atau tidak antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Artinya jika terdapat perbedaan kecenderungan antara kedua pertumbuhan belanja tersebut, maka dinyatakan bahwa pertumbuhan belanja langsung tidak sama besar dengan pertumbuhan belanja daerah, atau sebaliknya. Sedangkan jika kedua pertumbuhan belanja tersebut tidak terdapat perbedaan maka kedua pertumbuhan belanja tersebut sama-sama sejalan dengan pertumbuhan belanja daerah provinsi papua.

Karena uji ini merupakan uji untuk kesamaan dua koefisien (Ghozali, 2002: 51), untuk membuktikan penelitian dilakukan dalam dua tahapan yaitu:

Tahap pertama membentuk hipotesis untuk uji kesamaan:

Ho : $\alpha = \beta$, kecenderungan pertumbuhan belanja langsung sama dengan kecenderungan pertumbuhan belanja tidak langsung.

Ha : $\alpha \neq \beta$, kecenderungan pertumbuhan belanja langsung tidak sama dengan kecenderungan pertumbuhan belanja tidak langsung.

Adapun tahapan dalam uji Chow adalah (Arief S. 1993: 139) :

- 1) membuat trend dari gabungan observasi data untuk N_1 (Data Pertumbuhan Belanja Langsung) dan N_2 (Pertumbuhan Data Belanja Tidak Langsung) sehingga akan diperoleh hasil trend gabungan :

$$Y_i = C_0 + C_1 X_1 \dots\dots\dots (7)$$

Dari trend ini diperoleh nilai *Residual Sum of Square* yang kita sebut RSS_1 dengan degrees of freedom (d.f) = $N_1 + N_2 - k$ simbol k menunjukkan jumlah parameter termasuk konstanta.

- 2) Menaksir garis trend setiap sampel secara terpisah menggunakan data observasi N_1 dan N_2 , yang menghasilkan trend :

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 \dots\dots\dots \text{data } N_1 \dots\dots\dots (8)$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 \dots\dots\dots \text{data } N_2 \dots\dots\dots (9)$$

Dimana :

Y_1 = Data Pertumbuhan Belanja Langsung

Y_2 = Data Pertumbuhan Belanja Tidak Langsung

X_1 = Waktu

α, β = Koefisien Garis Trend

Dari trend ini masing-masing akan diperoleh RSS_2 (hasil regresi dengan data N_1) dengan d.f. = $N_1 - k$ dan RSS_3 (hasil regresi dengan data N_2) dengan d.f = $N_2 - k$

- 1) Menggabungkan RSS_2 dan RSS_3 yang menghasilkan RSS_4

$$RSS_4 = RSS_2 + RSS_3$$

- 2) Menghitung RSS_5 dengan mencari selisih RSS_1 dan RSS_4

$$RSS_5 = RSS_1 - RSS_4$$

- 3) Menguji hipotesis apakah kedua koefisien yang dibangun identik atau tidak (apakah seluruh koefisiennya secara mendasar berbeda atau tidak) dengan menggunakan uji- F. Adapun formula uji F adalah :

$$F = \frac{(RSS_5) / k}{(RSS_4) / (N_1 + N_2 - 2k)} \dots\dots\dots(10)$$

Pengujian ini akan disimpulkan sebagai berikut :

Jika nilai F hitung $< F_{d.f, v-n}$, maka secara mendasar seluruh koefisien dari kedua model trend tersebut tidak berbeda.

Jika nilai F hitung $> F_{d.f, v-n}$, maka secara mendasar seluruh koefisien dari kedua model trend tersebut berbeda,

Tahap kedua, berdasarkan hasil pengujian tahap pertama ;

jika H_0 ditolak yang berarti kecenderungan pertumbuhan belanja langsung tidak sama dengan kecenderungan pertumbuhan belanja tidak langsung maka akan dilihat apakah nilai $\alpha > \beta$ atau $\alpha < \beta$, jika hasilnya:

$\alpha < \beta$, maka H_0 pada hipotesis penelitian diterima, yang berarti belanja langsung belum dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan belanja daerah.

$\alpha > \beta$, maka H_0 pada hipotesis penelitian ditolak, yang berarti belanja langsung memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan belanja daerah.

Jika H_0 diterima yang berarti kecenderungan pertumbuhan belanja langsung sama dengan pertumbuhan belanja tidak langsung, maka secara langsung H_0 pada hipotesis penelitian diterima yang berarti $\alpha = \beta$ dan tidak ada perbedaan antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan belanja daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data belanja daerah provinsi papua tahun 2008-2013, akan dianalisis pertumbuhan belanja daerah. Pertumbuhan belanja daerah akan dihitung dari masing-masing belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada data belanja daerah menggambarkan realisasi belanja daerah tahun 2008-2013. Dimana masing-masing tabel menjelaskan pertumbuhan belanja daerah per tahunnya. Perhitungan pertumbuhan belanja daerah digunakan untuk mengetahui bahwa diantara belanja langsung dan belanja

tidak langsung mana yang lebih besar penggunaannya dari tahun ke tahun. Sehingga bisa menjadi pengetahuan bahwa belanja tersebut penggunaannya untuk membiayai kegiatan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program atau sebaliknya digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program.

Berdasarkan konteks pemikiran diatas maka berikut akan dijabarkan dan dianalisis pertumbuhan belanja daerah provinsi papua tahun 2008-20013 berdasarkan klasifikasi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel 2.
Analisis Pertumbuhan Belanja 2009

No	Uraian	Realisasi Tahun 2008 (Rp)	Realisasi Tahun 2009 (Rp)	Pertumbuhan	
				Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
BELANJA		5,750,667,126,461	5,294,198,937,980	(456,468,188,481)	(7,93)
1.	BELANJA LANGSUNG	2,500,768,153,234	2,917,633,595,199	416,865,441,965	16.67
	• Belanja Pegawai	769,500,402,932	826,156,299,567	56,655,896,635	7.36
	• Belanja Barang	682,075,010,164	891,988,194,602	209,913,184,438	30.78
	• Belanja Modal	1,049,192,740,138	1,199,489,101,030	150,296,360,892	14.32
2.	BELANJA TDK LANGSUNG	3,249,898,973,227	2,376,565,342,781	(873,333,630,446)	(26.87)
	• Belanja Hibah	5,630,000,000	442,780,000	(5,187,220,000)	(92.14)
	• Belanja Bantuan Sosial	534,314,519,702	500,127,970,500	(34,186,549,202)	(6.39)
	• Belanja Bantuan Keuangan	2,537,008,414,225	1,723,487,561,000	(813,520,853,225)	(32.06)
	• Belanja Tak Terduga	82,818,210,300	48,187,817,418	(34,630,392,882)	(41.81)
	• Transfer	90,127,829,000	104,319,213,863	14,191,384,863	(15.75)

Sumber: Data diolah Tahun 2015

Dari hasil perhitungan diatas realisasi pertumbuhan belanja daerah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2008 sebesar 7,93%. Penurunan pertumbuhan belanja daerah terjadi pada belanja tidak langsung sebesar 26,87% dari tahun sebelumnya. Penurunan belanja tidak langsung terjadi pada belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga, sedangkan transfer mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah provinsi papua pada tahun 2009 masih banyak digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan secara langsung. Sedangkan belanja yang fungsinya tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa belanja tidak langsung yang direalisasi untuk tahun ini masih rendah, sehingga belanja yang digunakan untuk kebutuhan umum yang ikut serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat masih sedikit.

Pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2009 pertumbuhan belanja paling besar terjadi pada belanja barang sebesar 30,78% dari belanja barang dan jasa pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena pada tahun tersebut anggaran belanja digunakan untuk membeli peralatan kantor seperti barang habis pakai atau aktiva lancar yang fungsinya kurang dari satu tahun. Sedangkan penurunan belanja paling besar terjadi pada belanja hibah sebesar 92.14%, penurunan ini terjadi karena belanja hibah atau pemberian untuk pemerintah pusat maupun organisasi, kabupaten atau kota menurun.

Tabel 3.
Analisis Pertumbuhan Belanja 2010

No	Uraian	Realisasi Tahun 2009 (Rp)	Realisasi Tahun 2010 (Rp)	Pertumbuhan	
				Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
BELANJA		5,294,198,937,980	5,650,474,891,742	356,275,953,762	6.72
1.	BELANJA LANGSUNG	2,917,633,595,199	3,442,131,155,901.14	524,497,560,702.14	17.97
	• Belanja Pegawai	826,156,299,567	777,065,779,301	(49,090,520,266)	(5.94)
	• Belanja Barang	891,988,194,602	1,260,514,916,732.14	368,526,722,130.14	41.31
	• Belanja Modal	1,199,489,101,030	1,404,550,459,868	205,061,358,838	17.09
2.	BELANJA TDK LANGSUNG	2,376,565,342,781	2,208,343,735,841	(168,221,606,940)	(7.07)
	• Belanja Hibah	442,780,000	61,440,129,856	60,997,349,856	13775
	• Belanja Bantuan Sosial	500,127,970,500	391,137,476,640	(108,990,493,860)	(21.8)
	• Belanja Bantuan Keuangan	1,723,487,561,000	1,640,726,759,000	(82,760,802,000)	(4.8)
	• Belanja Tak Terduga	48,187,817,418	5,710,600,000	(42,477,217,418)	(88,1)
	• Transfer	104,319,213,863	109,328,770,345	5,009,556,482	4.8

Sumber: Data diolah Tahun 2015

Pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2010 (tabel 5.2) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,72%. Peningkatan pertumbuhan belanja daerah paling besar terjadi pada belanja hibah sebesar 13775%, belanja hibah meningkat paling tinggi karena pemerintah menggunakan anggaran untuk memberikan hibah kepada pemerintah kabupaten/kota, dan sebagainya berbanding terbalik dengan pertumbuhan belanja hibah pada tahun sebelumnya, karena belanja hibah pada tahun 2009 merupakan belanja yang penurunan pertumbuhannya sangat tinggi. Sedangkan penurunan pertumbuhan paling besar terjadi pada belanja tak terduga dimana belanja tak terduga biasanya berupa belanja untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Hal ini menurun karena didalam daerah tidak memerlukan dana tersebut untuk membiayai kegiatan yang tidak biasa seperti bencana alam, dll.

Pada pertumbuhan belanja daerah tahun 2010 belanja tidak langsung mengalami penurunan sebesar 7,07%, sedangkan belanja langsung meningkat sebesar 17.97%. Ini berarti bahwa pertumbuhan belanja daerah tahun 2010 terjadi pada belanja langsung dimana pertumbuhan belanja langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Sedangkan untuk belanja tidak langsung menurun hanya belanja transfer dan belanja hibah yang mengalami peningkatan. Peningkatan belanja terjadi karena untuk memberikan dana bagi hasil kepada pemerintah kab/kota serta hibah kepada daerah, provinsi, dan lembaga berupa DAU dan Otsus.

Tabel 4.
Analisis Pertumbuhan Belanja 2011

No	Uraian	Realisasi Tahun 2010 (Rp)	Realisasi Tahun 2011 (Rp)	Pertumbuhan	
				Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
BELANJA		5,650,474,891,742	6,290,375,712,882	639,900,821,140	11.32
1	BELANJA LANGSUNG	3,442,131,155,901.14	3,640,415,370,360	198,284,214,458.86	5.76
	• Belanja Pegawai	777,065,779,301	866,786,394,314	89,720,615,013	11.54
	• Belanja Barang	1,260,514,916,732.14	1,351,970,752,489	91,455,835,756.86	7.25
	• Belanja Modal	1,404,550,459,868	1,421,658,223,557	17,107,763,689	1.21
2	BELANJA TDK LANGSUNG	2,208,343,735,841	2,649,960,342,522	441,616,606,681	19.9
	• Belanja Hibah	61,440,129,856	133,847,556,000	72,407,426,144	117.8
	• Belanja Bantuan Sosial	391,137,476,640	283,208,629,100	(107,928,847,540)	(27.6)
	• Belanja Bantuan Keuangan	1,640,726,759,000	2,126,256,726,000	485,529,967,000	29.6
	• Belanja Tak Terduga	5,710,600,000	2,978,368,924	(2,732,231,076)	(47.8)
	• Transfer	109,328,770,345	103,669,062,498	(5,659,707,847)	(5.17)

Sumber: Data diolah Tahun 2015

Pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2011 (tabel 5.3) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,32%, peningkatan ini terjadi karena pada belanja langsung dan tidak langsung sama-sama meningkat. Bahkan pada tahun 2011 keseluruhan belanja cenderung meningkat kecuali belanja bantuan social, belanja tak terduga, dan transfer. Penurunan belanja pada tiga item ini terjadi karena pada tahun tersebut pemerintah tidak menggunakan anggaran untuk membiayai keperluan daerah seperti bantuan social untuk masyarakat, begitu juga belanja tak terduga serta transfer. Sehingga pada pertumbuhan belanja daerah tahun tersebut cenderung digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah bukan untuk belanja public yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Pertumbuhan belanja daerah paling besar terjadi pada belanja hibah yaitu sebesar 117,8%, belanja ini digunakan untuk memberikan hibah atau disebut juga dengan dana bantuan namun kepada pemerintah kab/kota seperti dana alokasi umum dan otonomi khusus untuk membangun fasilitas umum demi

kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penurunan belanja daerah paling besar terjadi pada belanja tak terduga yaitu sebesar 47,8% karena belanja ini hanya digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan tak terduga seperti adanya bencana alam dan lain sebagainya.

Tabel 5.
Analisis Pertumbuhan Belanja 2012

No	Uraian	Realisasi Tahun 2011 (Rp)	Realisasi Tahun 2012 (Rp)	Pertumbuhan	
				Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
BELANJA		6,290,375,712,882	7,239,667,120,200	949,291,407,318	15.09
1	BELANJA LANGSUNG	3,640,415,370,360	3,656,406,598,592	15,991,228,232	0.44
	• Belanja Pegawai	866,786,394,314	806,432,183,247	(60,354,211,067)	(6.92)
	• Belanja Barang	1,351,970,752,489	1,540,796,547,967	188,825,795,478	13.97
	• Belanja Modal	1,421,658,223,557	1,309,177,867,378	(112,480,356,179)	(7.9)
2	BELANJA TDK LANGSUNG	2,649,960,342,522	3,583,260,521,608	933,300,179,086	10.35
	• Belanja Hibah	133,847,556,000	693,635,742,128	559,788,186,128	418.2
	• Belanja Bantuan Sosial	283,208,629,100	110,610,955,800	(172,597,673,300)	(60.9)
	• Belanja Bantuan Keuangan	2,126,256,726,000	2,664,612,608,600	538,355,882,600	25.32
	• Belanja Tak Terduga	2,978,368,924	0	(2,978,368,924)	(100)
	• Transfer	103,669,062,498	114,401,215,080	10,732,152,582	10.35

Sumber: Data diolah Tahun, 2015

Pada tahun 2012 pertumbuhan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 15,09% (tael 5.4). Pada belanja langsung dan belanja tidak langsung pertumbuhan belanjanya sama-sama meningkat akan tetapi di dalam belanja langsung terdapat belanja barang yang mengalami penurunan yaitu sebesar 6,92%. Penurunan belanja barang terjadi karena pada tahun sebelumnya jumlah barang yang diperlukan dalam kantor seperti aktiva lancar yang masih dapat digunakan dalam periode satu tahun masih mempunyai nilai residu. Sehingga realisasi belanja barang pada tahun tersebut menurun. Begitu juga pada belanja tidak langsung terdapat pertumbuhan belanja yang menurun yaitu belanja bantuan social dan belanja tak terduga. Belanja bantuan social menurun sebesar 60,9%, sedangkan belanja tak terduga menurun sebesar 100%.

Pertumbuhan belanja daerah paling tinggi terjadi pada belanja hibah sebesar 418,2% pertumbuhan belanja tersebut terjadi karna adanya belanja hibah kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota serta organisasi masyarakat atau lembaga disuatu daerah. Sedangkan penurunan pertumbuhan belanja daerah paling rendah terjadi pada belanja tak terduga yaitu sebesar 100%, penurunan ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pemerintah daerah tidak menggunakan anggaran sama sekali atau sama dengan nol untuk belanja tak terduga.

Tabel 6.
Analisis Pertumbuhan Belanja 2013

No	Uraian	Realisasi Tahun 2012 (Rp)	Realisasi Tahun 2013 (Rp)	Pertumbuhan	
				Peningkatan/ Penurunan (Rp)	%
BELANJA		7,239,667,120,200	8,171,352,348,477	931,685,228,277	12.86
1	BELANJA LANGSUNG	3,656,406,598,592	3,748,302,884,224	91,896,285,632	2.52
	-Belanja Pegawai	806,432,183,247	833,439,639,685	27,007,456,438	3.34
	-Belanja Barang	1,540,796,547,967	1,694,118,393,186	153,321,845,219	9.95
	-Belanja Modal	1,309,177,867,378	1,220,744,851,353	(88,433,016,025)	(6.75)
2	BELANJA TDK LANGSUNG	3,583,260,521,608	4,423,049,464,253	839,788,942,645	23.44
	-Belanja Hibah	693,635,742,128	651,084,026,068	(42,551,716,060)	(6.13)
	-Belanja Bantuan Sosial	110,610,955,800	178,167,169,800	67,556,214,000	61.07
	-Belanja Bantuan Keuangan	2,664,612,608,600	3,348,440,830,650	683,828,222,050	25.66
	-Belanja Tak Terduga	0	12,556,773,000	12,556,773,000	0
	-Transfer	114,401,215,080	232,800,664,735	118,399,449,655	103.5

Sumber: Data diolah Tahun, 2015

Dari tabel diatas (tabel 6) dapat dilihat bahwa pertumbuhan belanja daerah provinsi papua mengalami peningkatan sebesar 12,86%. Pada tahun anggaran tersebut belanja langsung dan belanja tidak langsung sama-sama meningkat yaitu belanja langsung sebesar 2,52% sedangkan belanja tidak langsung sebesar 23,44%. Dilihat dari persentasenya belanja tidak langsung tumbuh lebih besar daripada belanja langsung. Pertumbuhan belanja tidak langsung terjadi karena transfer meningkat sebesar 103,5% kenaikan ini terjadi Karena pada tahun tersebut pemerintah daerah memberi transfer kepada kecamatan maupun desa. Pertumbuhan belanja daerah paling besar terjadi pada transfer dan paling rendah terjadi pada belanja modal. Belanja modal pada tahun tersebut menurun karena penggunaan barang modal masih mempunyai nilai residu (sisa) dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari keseluruhan pertumbuhan belanja daerah dari tahun ke tahun belanja daerah mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2009 belanja daerah mengalami penurunan sebesar 7,93%. Penurunan belanja daerah pada tahun tersebut terjadi karena belanja tidak langsung secara keseluruhan mengalami penurunan. Sedangkan pertumbuhan belanja daerah dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 15,09%, peningkatan pertumbuhan belanja daerah terjadi karena pertumbuhan belanja hibah mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 418,2%.

Sedangkan dari tahun ke tahun pertumbuhan belanja paling besar terjadi pada belanja hibah sebesar 13775% pada tahun 2010. Pertumbuhan belanja hibah yang sangat besar terjadi karena pada tahun tersebut pemerintah daerah mengalokasikan dana kepada pemerintah, perusahaan daerah, masyarakat atau

organisasi masyarakat dalam bentuk uang atau barang/jasa dalam jumlah besar. Sedangkan penurunan pertumbuhan yang paling besar dari tahun ke tahun terjadi pada belanja tak terduga sebesar 100% pada tahun 2012. Penurunan ini terjadi karena pada tahun tersebut pemerintah daerah tidak menggunakan anggarannya sama sekali untuk belanja tak terduga.

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan belanja daerah secara keseluruhan, berikutnya akan diklasifikasikan ke dalam pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel 7.
Realisasi Pertumbuhan Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung tahun 2008-2013

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2009	(7,93)	16.67	(26.87)
2010	6.72	17.97	(7.07)
2011	11.32	5.76	19.9
2012	15.09	0.44	10.35
2013	12.86	2.52	2.52

Sumber: data diolah tahun 2015

Berdasarkan Pertumbuhan Realisasi Belanja langsung dan Belanja tidak langsung menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah tiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2009 belanja daerah menurun sebesar 7,93% dimana belanja tidak langsung juga menurun sebesar 26,78%. Penurunan pada belanja tidak langsung terjadi karena pada tahun tersebut secara keseluruhan realisasi belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak terkait langsung oleh pelaksanaan program pemerintah mengalami penurunan.

Tahun 2010 realisasi belanja daerah meningkat sebesar 6,72%. Namun peningkatan pertumbuhan belanja daerah tidak diiringi dengan pertumbuhan belanja tidak langsung yang mengalami penurunan sebesar 7,07%, sedangkan belanja langsung meningkat sebesar 17,97%. Sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan belanja daerah terus meningkat hingga tahun 2013 (tabel 5.6) sejalan dengan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang semakin meningkat (tabel 5.6), hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada tahun 2011-2013 digunakan untuk membiayai belanja yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Pertumbuhan belanja daerah yang ditunjukkan berdasarkan nilai nominal dan persentase dari total belanja yang diperoleh setiap tahunnya memiliki nilai positif dan negatif. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja setiap

tahunnya. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan pengurangan belanja pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Pertumbuhan realisasi belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak terlalu diperlukan untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bisa dihilangkan dan dialihkan untuk belanja lain yang lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal daerah terjaga.

Uji Chow

Untuk menganalisis bagaimana perbedaan kecenderungan antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung. Maka perlu dilakukan uji perbedaan kecenderungan dengan uji chow. Dasar pemikirannya adalah pertumbuhan belanja daerah merupakan suatu perkembangan pengeluaran pemerintah daerah setiap tahunnya untuk membiayai keperluan daerah, baik yang terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang biasa disebut belanja langsung, maupun yang tidak terkait dengan program dan kegiatan yang disebut belanja tidak langsung.

Sebelum melakukan uji perbedaan kecenderungan akan dilakukan uji regresi dengan melihat nilai realisasi pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka akan digambarkan nilai atau total realisasi pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pertumbuhan belanja daerah tahun 2008-2013 pada tabel berikut:

Tabel 8.
Realisasi Pertumbuhan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung tahun 2008-2013

Tahun	Belanja Daerah	Belanja Langsung	Belanja Tidak Langsung
2009	(7,93)	16.67	(26.87)
2010	6.72	17.97	(7.07)
2011	11.32	5.76	19.9
2012	15.09	0.44	10.35
2013	12.86	2.52	2.52

Sumber: data diolah tahun 2015

Setelah melakukan uji regresi maka akan dihasilkan nilai RSS (Residual Sum Of Squares) serta nilai coefficient dari masing-masing variable. Untuk melihat nilai RSS (Residual Sum Of Square) hasil regresi dari kedua trend gabungan serta dari masing-masing variable, maka akan di gambarkan pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 9.
Hasil Regresi

Regresi	Residual Sum Of Squares	Coefficient
Belanja Langsung	127,16	-0,89
Belanja Tidak Langsung	34,36	0,35
• Belanja Langsung dan • Belanja Tidak Langsung	6,18	• 0,95 • 0,63

Sumber: data diolah, 2015

Prosedur pengujian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap 1. Membuat model trend pertumbuhan gabungan dari kedua variabel melalui penggabungan data observasi, dimana dari trend ini diperoleh nilai *Residual Sum of Square* yang kita sebut RSS_1 sebesar 6,18.

Tahap 2. Membuat model trend pertumbuhan dari masing-masing variabel berdasarkan data observasi masing-masing, dimana dari hasil perhitungan dari model trend pertumbuhan belanja langsung ini diperoleh RSS_2 sebesar 127,16. Sedangkan hasil perhitungan dari model trend pertumbuhan belanja tidak langsung diperoleh RSS_3 sebesar 34,36.

Tahap 3. Pada tahap ini ditentukan RSS_4 yang merupakan penjumlahan dari nilai RSS masing-masing variabel (RSS_2 dan RSS_3), hasil perhitungannya adalah :

Selanjutnya berdasarkan penjumlahan nilai RSS_2 dan RSS_3 merupakan nilai RSS_4

$$RSS_4 = RSS_2 + RSS_3$$

$$RSS_4 = 127,16 + 34,36$$

$$RSS_4 = 161,52$$

Tahap 4. Menentukan RSS_5 yang dilakukan dengan menghitung selisih antara RSS_1 dan RSS_4 dengan hasil :

$$RSS_5 = RSS_1 - RSS_4$$

$$RSS_5 = 6,18 - 161,52$$

$$RSS_5 = -155,34$$

Tahap 5. Melakukan pengujian kesamaan koefisien dengan menggunakan Uji F adapun formula uji F yang digunakan adalah :

$$F = \frac{(RSS_5) / k}{(RSS_4) / (N_1 + N_2 - 2k)}$$

$$F = \frac{(-155,34) / 3}{(161,52) / (5 + 5 - 2(3))}$$

$$F = \frac{-51,78}{40,38} = -1,28$$

Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai F hitung dengan nilai F tabel pada $\alpha = 5\%$ dengan derajat bebas pembilang $v_1=2$ dan derajat bebas penyebut $v_2=2$, dimana nilainya adalah $F_{0,05, 2,2} = 19,00$. Hasil perbandingan antara F hitung dan F tabel menunjukkan bahwa $F_{hitung} < F_{tabel}$ ($-1,28 < 19,00$) maka H_a yang menyatakan koefisien $\alpha \neq \beta$ ditolak. Ditolaknya H_a memberi pengertian bahwa kedua koefisien tersebut tidak berbeda atau sama secara signifikan.

Berdasarkan besar nilai koefisien dari kedua garis trend tersebut (koefisien kecenderungan pertumbuhan belanja langsung dalam pertumbuhan belanja daerah sebesar 0,95 dan koefisien kecenderungan pertumbuhan belanja tidak langsung dalam pertumbuhan belanja daerah sebesar 0,63) maka dapat dinyatakan bahwa kecenderungan pertumbuhan belanja langsung tidak berbeda dengan kecenderungan pertumbuhan belanja tidak langsung setiap tahunnya ($\alpha = \beta$). Tidak adanya perbedaan kecenderungan antara pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung yang dilihat berdasarkan hasil perhitungan uji chow yang menunjukkan bahwa F tabel lebih besar daripada F hitung. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung berada pada garis regresi yang stabil. Sehingga dinyatakan bahwa pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung cenderung tumbuh bersama-sama dan tidak terdapat perbedaan kecenderungan setiap tahunnya. Dimana jika dibuat dalam bentuk garis regresi kedua pertumbuhan belanja tersebut terus mengalami kecenderungan pertumbuhan yang tidak berbeda setiap tahunnya.

Jika dilihat dalam presentase, pertumbuhan belanja langsung lebih besar yaitu 95% daripada pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 63%, namun jika dilihat dalam perbedaan kecenderungannya kedua belanja tersebut tidak mengalami perbedaan kecenderungan. Dimana pertumbuhan kedua belanja mengalami kecenderungan dalam pertumbuhan belanja daerah yang sama besar yaitu diatas 50% setiap tahunnya. Sehingga jika dilakukan analisis kembali pada pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung keduanya akan berada pada garis regresi yang stabil.

Tidak adanya perbedaan kecenderungan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam pertumbuhan belanja daerah dapat disimpulkan bahwa α sama dengan β ($\alpha = \beta$). Sehingga H_0 diterima yang berarti kecenderungan pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung samabesarnya. Maka secara langsung H_0 pada hipotesis penelitian diterima yang berarti $\alpha = \beta$

dan tidak ada perbedaan kecenderungan antara pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan belanja daerah.

Sebagaimana diketahui dari hasil analisis yang menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja daerah berdasarkan data 5 (lima) tahun yang terdiri dari pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung cenderung tumbuh karena kedua belanja tersebut. Pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung sama-sama cenderung tumbuh dalam pertumbuhan belanja daerah. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung terhadap program dan kegiatan pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Dalam belanja langsung yang berkaitan dengan belanja pegawai biasanya digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai, uang lembur serta honorarium pegawai pemerintah daerah. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa juga menjadi alasan bahwa pertumbuhan belanja langsung meningkat. Hal ini dikarenakan bahwa pada belanja barang dan jasa pengeluaran digunakan untuk membeli peralatan atau barang habis pakai seperti alat tulis kantor dan lain sebagainya. Sedangkan pada belanja modal cenderung digunakan untuk membiayai belanja asset tetap yang dapat digunakan dalam jangka panjang namun biaya atau anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai belanja tersebut cukup besar.

Untuk kecenderungan pertumbuhan belanja tidak langsung juga disebabkan pengeluaran untuk membiayai belanja bantuan, bagi hasil, serta belanja lain yang digunakan untuk public agar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan nilai koefisien kecenderungannya, terlihat bahwa pertumbuhan belanja langsung (0,95) dan belanja tidak langsung (0,63) keduanya cenderung tumbuh sama-sama. Kondisi ini memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa trend pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung sama-sama memberikan kecenderungan dalam pertumbuhan belanja daerah.

Kecenderungan atau trend tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang ada sama-sama berjalan beriringan yaitu digunakan untuk proses kegiatan pemerintah serta digunakan untuk keperluan atau kepentingan masyarakat bersama.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa, pada bab pembahasan di depan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami penurunan dan kenaikan, penurunan terjadi pada tahun 2009 sebesar 7,93% sedangkan tahun-tahun selanjutnya kembali meningkat, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012 sebesar

15.09%. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja setiap tahunnya. Sedangkan pertumbuhan belanja langsung mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2010 sebesar 17.97%, dan belanja tidak langsung mengalami peningkatan dan penurunan, penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 26.87% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 19.9%

2. Dari hasil pembahasan kecenderungan pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung dalam pertumbuhan belanja daerah provinsi Papua. Berdasarkan hasil uji Chow yang menyatakan bahwa F-tabel lebih besar daripada f-hitung maka pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung tidak mengalami perbedaan kecenderungan. Sehingga jika dibuat dalam bentuk garis regresi kedua pertumbuhan belanja tersebut terus mengalami kecenderungan pertumbuhan yang tidak berbeda setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung berada pada garis regresi yang stabil dengan nilai koefisien pertumbuhan belanja langsung sebesar 0,95 dan nilai koefisien pertumbuhan belanja tidak langsung sebesar 0,63. Jika dilihat dalam persentase, pertumbuhan belanja langsung lebih besar yaitu 95% daripada pertumbuhan belanja tidak langsung yaitu sebesar 63%, namun jika dilihat dalam perbedaan kecenderungannya kedua belanja tersebut tidak mengalami perbedaan kecenderungan. Dimana pertumbuhan kedua belanja mengalami kecenderungan dalam pertumbuhan belanja daerah yang sama besar yaitu diatas 50% setiap tahunnya. Sehingga jika dilakukan analisis kembali pada pertumbuhan belanja langsung dan pertumbuhan belanja tidak langsung keduanya akan berada pada garis regresi yang stabil.

Saran

Dalam upaya menjaga stabilitas fiskal serta berkesinambungan antara pertumbuhan belanja daerah tahun lalu, tahun sekarang dan tahun-tahun selanjutnya maka perlu perencanaan yang lebih baik untuk menentukan belanja daerah yang akan direalisasikan. Sehingga Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Afriyanto Harnita. 2013. *Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
- Ahmad Yani (2002) dalam Afriyanto Harnita. 2013. *Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
- Fransisca Roosiana Kurniawati. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia*. Tesis (tidak diterbitkan) Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta

- Halim (2012) dalam Afriyanto Harnita.2013. *Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
- HAW. Widjaja, 2004, *Penyelenggaraan otonomi Di Indortesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang *pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah*.
- Mardiasmo (2011) dalam Afriyanto Harnita Harnita.2013 *Analisis Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Rokan Hulu*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian
- Nur Indah Rahmawati. 2010. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/kota di Jawa Tengah)*. Tesis (tidak diterbitkan) Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro;
- Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Srikandi Cipto Mangunkusumo. 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD) Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Wilayah Pulau Jawa Periode 2009-2011*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
- Sumarsono, Sonny. 2010.*Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan*